

ANALISIS SOSIAL FENOMENA KEMISKINAN (Perspektif Sosiologi)

Oleh

¹Sakaruddin Mandjarreki

¹Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar

Abstrak; Konsep dan definisi kemiskinan merupakan titik tolak pembahasan yang penting, mengingat konsep kemiskinan melatarbelakangi pendekatan yang digunakan dalam menanggulangi kemiskinan dan pilihan indikator-indikator untuk memantau kondisi kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks, bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin.

Dari aspek genesisnya, kemiskinan sesungguhnya merupakan fenomena patologi sosial yang telah menjadi warisan dunia dari masa ke masa. Seluruh dunia dalam perspektif global pernah mengalami duka kemiskinan kendati kemakmuran telah berhasil diraih oleh banyak negara dewasa ini. Pada skala nasional saat ini, kemiskinan makin merajalela dan sulit dikendalikan kendati berdasarkan data yang ada jumlah angka kemiskinan pada era orde baru cukup mencengangkan dunia. Sebelum masa krisis pada tahun 1997, Indonesia menjadi model pembangunan bagi dunia yang diakui berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari pembangunan yang dilakukan dalam banyak bidang secara konsisten dan menyeluruh.

Menjelaskan kemiskinan sebagai kondisi yang menggambarkan keserbakekurangan yang dialami oleh individu atau sekelompok orang dalam pelbagai dimensinya, secara sosiologis dapat dijelaskan dengan menggunakan berbagai sudut pandang teori. Untuk menjelaskan hal ini, Teori Strukturasi Giddens digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis persoalan ini secara terbatas.

SOCIAL ANALYSIS OF POVERTY PHENOMENON (Sociological Perspective)

By

¹Sakaruddin Mandjarreki

¹Lecturer of the Faculty of Da'wah and Communication at UIN Alauddin
Makassar

Abstract; The concept and definition of poverty is an important starting point for discussion, considering that the concept of poverty is the background of the approach used in reducing poverty and the choice of indicators to monitor poverty conditions. Poverty is a very complex multidimensional problem, not only measured by income, but also concerning the vulnerability and vulnerability of a person or group of people, both men and women, to become poor.

From the aspect of genesis, poverty is actually a social pathological phenomenon that has become a world heritage from time to time. The whole world in a global perspective has experienced poverty despite the prosperity achieved by many countries today. At the current national scale, poverty is increasingly rampant and difficult to control, although based on available data, the number of poverty rates in the New Order era was quite astonishing in the world. Prior to the crisis in 1997, Indonesia became a model of development for the world which was recognized as having succeeded in significantly reducing poverty. The success achieved cannot be separated from the development carried out in many fields consistently and thoroughly.

Explaining poverty as a condition that describes the multiplicity of deficiencies experienced by individuals or groups of people in its various dimensions, can be explained sociologically using various theoretical points of view. To explain this, Giddens Structural Theory is used as an approach in analyzing this problem in a limited way.

A. Latar Belakang

Penanggulangan kemiskinan adalah salah satu prioritas pembangunan sebagaimana termuat dalam UU No.25 tahun 2000 tentang PROPENAS. Dalam PROPENAS dengan jelas disebutkan bahwa sasaran yang harus dicapai dalam lima tahun periode pembangunan (2002-2004) adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin absolut sebesar 4 % dari tingkat kemiskinan- yang menurut data tahun 1999 sebesar 37,5 jutajiwa (18 % penduduk) menjadi 14 % atau sebesar 28,86 juta jiwa pada tahun 2004. Dengan demikian maka di tingkat daerah program penanggulangan kemiskinan harus mendapatkan arah dan kebijakan yang selaras dengan arah dan kebijakan pusat.

Di era dimana proses keberdayaan masyarakat tidak melulu ditentukan oleh banyaknya luncuran bantuan yang diberikan kepadanya melalui pelbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan, melainkan ditentukan oleh kesadaran kritis warga untuk mau maju dengan mengandalkan potensi internalitas dan potensi eksternalitasnya, maka yang menjadi prasyarat utama dalam mendukung terwujudnya harapan ini adalah perlunya komitmen pemerintah daerah untuk tetap konsisten dan serius pada upaya-upaya yang berkaitan langsung dengan penanggulangan kemiskinan. Sejumlah program dan kegiatan yang diarahkan pada upaya ini harus senantiasa merujuk pada kondisi yang ada serta kontekstual sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisir sedini mungkin.

Sejak dekade silam, telah begitu banyak dilakukan studi tentang kemiskinan yang meliputi definisi yang lebih *acceptable* pada lintas kalangan, obyektifikasi yang disebut miskin melalui penemuan indikator yang lebih presisi hingga pada bagaimana cara menanggulanginya dengan efektif dan cepat. Pada spasi panjang kegiatan dimaksud, hingga kini belum ada penyepakatan secara formal dan kondusif pada perspektif yang beragam perihal kemiskinan itu sendiri berikut isu-isu kompleks yang melingkupinya. Persoalannya adalah karena kemiskinan itu sendiri senantiasa ditinjau dari konteks yang berbeda-beda, spekulatif dan bahkan berdasar pada preferensi keilmuan tertentu. Membincang isu ini maka kita diperhadapkan pada sebuah keruwetan intelektual dan kekakuan secara idealisme menyangkut siapa yang lebih berhak disebut miskin kendati ditinjau pada semua matra kehidupan, klasifikasi-klasifikasinya hingga pada treatment yang tepat dalam upaya penanggulangannya.

Berdiskusi tentang masalah kemiskinan yang secara mutlak (*absolute*) dan menentukan siapa yang tergolong miskin di dalam suatu perekonomian, maka biasanya yang digunakan adalah garis kemiskinan. Dalam penertian ini, mereka yang berada dibawah garis kemiskinan tersebut dikategorikan sebagai “golongan miskin”, dan mereka yang berada di atas garis kemiskinan tersebut dikelompokkan sebagai “tidak miskin”. Garis kemiskinan tersebut dapat mengambil berbagai bentuk, seperti jumlah pendapatan dalam unit uang, atau jumlah konsumsi dalam unit uang, atau pun jumlah konsumsi kalori per hari.

B. Pembahasan

Dewasa ini, pengertian garis kemiskinan selain menimbulkan berbagai perdebatan, juga dalam banyak kasus dinilai kurang memadai karena tidak

mencerminkan kondisi riil kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Levitan (1980) misalnya mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Schiller (1979), kemiskinan adalah ketidak sanggupannya untuk mendapat barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Dan, dengan nada yang sama Emil Salim mendefinisikan kemiskinan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok (Ala, 1981).

Sebagai satu masalah sosial, memang kemiskinan seringkali dipahami dalam pengertian yang sangat sederhana, yaitu sebagai keadaan kekurangan uang, rendahnya pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Padahal sebenarnya, kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks, baik dari faktor penyebab maupun dari dampak yang ditimbulkannya (Informasi Dasar Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Bappenas, 2003:). Pada perspektif sosiologi, kemiskinan sesungguhnya bukan semata-mata kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau standar hidup layak, namun lebih dari itu esensi kemiskinan adalah menyangkut kemungkinan atau probabilitas orang atau keluarga miskin itu untuk melangsungkan dan mengembangkan usaha serta taraf kehidupannya. Banyak bukti menunjukkan bahwa yang disebut orang atau keluarga miskin pada umumnya selalu lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga seringkali makin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi.

Definisi yang lebih lengkap tentang kemiskinan dikemukakan oleh Jhon Friedman. Menurut Friedman (1979), kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Sementara yang dimaksud basis kekuasaan sosial itu menurut Friedman meliputi: 1). Modal produktif atas asset, misalnya tanah perumahan, peralatan dan kesehatan, 2). Sumber keuangan, seperti *income* dan kredit yang memadai, 3). Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi, 4). *Network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, materi, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, 5). Informasi-informasi yang berguna untuk menunjang kehidupan yang lebih baik.

Menurut akar penyebab yang melatarbelakanginya, secara teoritis kemiskinan dibedakan menjadi dua kategori yakni; a). Kemiskinan alamiah, yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka

jumlahnya dan atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Artinya faktor-faktor yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin adalah secara alami memang ada, dan bukan bahwa bahkan ada kelompok atau individu di dalam masyarakat tersebut yang lebih miskin dari yang lain. Mungkin saja keadaan kemiskinan alamiah tersebut akan terdapat perbedaan-perbedaan kekayaan, tetapi dampak perbedaan tersebut akan diperlunak atau dieliminasi oleh adanya pranata-pranata tradisional, seperti pola hubungan *patron-client*, jiwa gotong-royong, dan sejenisnya yang fungsional untuk meredam kemungkinan timbulnya kecemburuan sosial, b). Kemiskinan buatan, yakni kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Dengan demikian sebagian anggota masyarakat tetap miskin walaupun sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan.

Kemiskinan buatan dalam banyak hal terjadi bukan karena seorang individu atau anggota keluarga malas bekerja atau karena terus-menerus sakit. Berbeda dengan perspektif modernisasi yang cenderung memvonis kemiskinan bersumber dari lemahnya etos kerja, tidak dimilikinya etika wirausaha atau karena budaya yang tidak terbiasa dengan kerja keras, kemiskinan buatan dalam perbincangan di kalangan ilmuawan sosial acapkali diidentikkan dengan pengertian kemiskinan struktural. Menurut Selo Soemardjan (1980), yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Secara teoritis, kemiskinan buatan atau kemiskinan struktural dapat diartikan sebagai suasana kemiskinan yang alami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber, dan oleh karena itu dapat dicari pada struktur sosial yang berlaku adalah sedemikian rupa keadaannya sehingga mereka yang termasuk ke dalam golongan miskin tampak tidak berdaya untuk mengubah nasibnya dan tidak mampu memperbaiki hidupnya. Struktur sosial yang berlaku telah mengurung mereka ke dalam suasana kemiskinan secara turun-temurun selama bertahun-tahun. Sejalan dengan itu, mereka hanya mungkin keluar dari penjara kemelaratan melalui proses perubahan struktur yang mendasar.

Kemiskinan struktural, biasa terjadi di dalam suatu masyarakat dimana terdapat perbedaan yang tajam antara mereka yang hidup melarat dengan mereka yang hidup dalam kemewahan dan kaya-raya. Mereka itu, walaupun merupakan

mayoritas terbesar dari masyarakat, dalam realita tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk memperbaiki nasib hidupnya. Sedangkan minoritas kecil masyarakat yang kaya-raya biasanya berhasil memonopoli dan mengontrol berbagai kehidupan, terutama segi ekonomi dan politik. Selama golongan kecil yang kaya-raya itu masih menguasai berbagai kehidupan masyarakat, selama itu pula diperkirakan struktur sosial yang berlaku akan bertahan. Akibatnya terjadilah apa yang disebut dengan kemiskinan struktural.

Golongan yang menderita kemiskinan struktural itu, misalnya terdiri dari para petani yang tidak memiliki tanah sendiri, atau kaum migran di kota yang bekerja di sektor informal dengan hasil yang tidak menentu sehingga pendapatannya tidak mencukupi untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Termasuk golongan miskin lain adalah pedagang kaki lima, pedagang asongan, dan lain-lain yang tidak terpelajar dan tidak terlatih (*unskilled labour*).

Ciri utama dari kemiskinan struktural ialah tidak terjadinya dan sekalipun terjadi sifatnya lamban sekali, yakni apa yang disebut dengan mobilitas sosial vertikal. Menurut pendekatan struktural, adalah terletak pada kemungkinan struktural sosial yang menyebabkan mereka kekurangan hasrat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Struktur sosial yang berlaku telah melahirkan berbagai corak rintangan yang menghalangi mereka untuk maju.

Ciri lain dari kemiskinan struktural adalah timbulnya ketergantungan yang kuat pihak si miskin terhadap kelas sosial-ekonomi di atasnya. Menurut Mohtar Mas'ud (1994), adanya ketergantungan inilah yang selama ini berperan besar dalam memerosotkan kemampuan si miskin untuk *bargaining* dalam dunia hubungan sosial yang sudah timpang antara pemilik tanah dan penggarap, antara majikan dan buruh atau antara patron dan klien. Buruh tidak punya kemampuan untuk menetapkan upah, pedagang kecil tidak bisa mendapatkan harga yang layak atas barang yang mereka jual. Pendek kata pihak yang miskin relatif tidak dapat berbuat banyak atas eksploitasi dan proses marginalisasi yang dialaminya karena mereka tidak memiliki alternatif pilihan untuk menentukannasib ke arah yang lebih baik.

Pengertian dan definisi kemiskinan struktural, kendati menjadi alternatif konsep yang lebih familiar di kalangan ilmuawan sosial, tetapi kelebihan definisi seperti yang dikemukakan Selo Soemardjan di atas diakui atau tidak sesungguhnya cenderung bersifat ideologis dalam arti definisi di atas populer karena di sana ada semangat dan nilai-nilai yang menggugat kemapanan dan status quo.

Definisi dan pengertian kemiskinan yang lebih lengkap dikemukakan oleh Chambers (1987). Menurut Chambers, inti dari masalah kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan. Secara rinci, *deprivation trap* terdiri dari unsur, yaitu: (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) keterasingan atau kadar isolasi, (4) kerentanan, dan (5) ketidakberdayaan. Kelima unsur ini seringkali saling terkait satu dengan yang lain sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang benar-benar berbahaya dan mematikan peluang hidup orang atau keluarga miskin.

Dari kelima dimensi di atas, kerentanan dan ketidakberdayaan perlu mendapat perhatian utama. Kerentanan menurut Chambers dapat dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu guna untuk menghadapi situasi darurat seperti datangnya bencana alam, kegagalan panen, atau penyakit yang tiba-tiba menimpa keluarga miskin itu. Kerentanan ini sering menimbulkan *poverty rackerts* atau “roda penggerak kemiskinan” yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda dan asset produksinya sehingga mereka menjadi makin rentan dan tidak berdaya.

Seseorang atau sebuah keluarga yang miskin acapkali mampu tetap *survive* dan bahkan bangkit kembali terutama bila mereka memiliki jaringan atau pranata sosial yang melindungi dan menyelamatkan. Tetapi, seseorang atau keluarga yang jatuh pada lingkaran setan perangkap kemiskinan, mereka umumnya sulit untuk bangkit kembali. Seseorang yang dibelit perangkap kemiskinan tidak bisa ikut menikmati hasil pembangunan dan justru menjadi korban pembangunan, rapuh atau tidak sulit mengalami peningkatan kualitas kehidupan, dan bahkan mengalami penurunan kualitas kehidupan (Suyanto, 1996).

Secara empirik banyak bukti memperlihatkan bahwa naiknya penduduk di atas garis kemiskinan tidak otomatis berarti penduduk tersebut hidupnya benar-benar bebas dari ancaman dan perangkap kemiskinan, melainkan penduduk tersebut sebenarnya hanya berpindah dari satu tahap kemiskinan yang terendah, yaitu tahap *destitute* ke tahap apa yang disebut sebagai *near poor*. Bila sewaktu-waktu kelompok *near poor* ini menghadapi suatu krisis, maka dengan cepat kelompok *near poor* ini akan melorot lagi ke status *destitute*. Sebuah keluarga petani yang termasuk kelompok *near poor* tidak mustahil terpaksa turun kelas menjadi kelompok *destitute* bila tanpa diduga panen mereka tiba-tiba gagal karena serangan hama, karena serangan banjir, atau karena anjloknya harga jual di pasaran akibat ulah pengepul gabah.

Dalam kenyataan bahwa kelompok masyarakat yang termasuk cukupan atau kaya – bukan kelompok *near poor* – tiba-tiba harus mengalami penurunan status yang drastis, yakni masuk ke dalam kelompok “keluarga miskin baru”. Jadi, berbeda dengan kesan dan pembangunan yang dikeluarkan pemerintah di Orde Baru yang kerap menyebutkan jumlah orang miskin di Indonesia senantiasa turun dari waktu ke waktu, dalam kenyataan justru tidak jarang terjadi penambahan jumlah orang miskin.

1. Ciri Dari Penduduk Atau Keluarga Miskin

Secara umum yang termasuk penduduk atau keluarga miskin, selain ditandai dengan keterbatasan pendapatan dan modal usaha, mereka biasanya juga memiliki keterbatasan dalam mengakses berbagai saran kebutuhan dasar. Secara lebih rinci, beberapa ciri dari penduduk atau keluarga miskin adalah: 1). Mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ciri umumnya adalah tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti: tanah yang cukup, modal atau keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki umumnya sedikit, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas, 2). Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha. Tidak dimilikinya akses untuk mengelola kredit perbankan, seperti jaminan kredit dan lain-lain mengakibatkan mereka berpaling ke lintah darat yang cenderung menjerat dan mengeksploitasi, 3). Memiliki tingkat pendidikan yang relative rendah bahkan sebagian diantaranya tidak pernah menempuh pendidikan formal Sebagian besar waktunya habis tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar, 4). Banyak di antara mereka yang tinggal di daerah pedesaan, dan tidak mempunyai tanah garapan dan jika ada biasanya relatif kecil sekali. Pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar pertanian, tetapi karena bekerja di pertanian berdasarkan musiman, maka kesinambungan pekerjaan mereka menjadi kurang terjamin. Banyak di antara mereka lalu menjadi pekerja bebas (*self employed*) yang berusaha apa saja. Akibat di dalam situasi penawaran tenaga kerja yang besar, maka tingkat upah menjadi rendah sehingga mengurung mereka selalu hidup di bawah garis kemiskinan, 5). Mereka adalah umumnya angkatan kerja dengan usia produktif tetapi tidak mempunyai keterampilan dan pendidikan yang mumpuni.

Masalah kemiskinan pada dasarnya merupakan masalah yang teramat kompleks dan pemecahannya pun sangat sulit. Oleh karena itu, dalam menganalisis masalah kemiskinan ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan.

Pertama, bahwa kemiskinan itu adalah multi-dimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia bermacam-macam, maka kemiskinan memiliki banyak aspek. Menurut Jhon Friedmann, bila dilihat dari segi *public policy*, maka terdapat dua aspek kemiskinan, yakni: aspek primer yang berupa miskin akan asset-asset, organisasi sosial dan politik, dan pengetahuan dan keterampilan. Dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Sedangkan mengenai dimensi kemiskinan, sekurang-kurangnya terdapat sepuluh dimensi, yakni: miskin dalam hal kekuasaan, harta benda atau harta kekayaan, kesehatan, pendidikan dan pengetahuan. Keterampilan dan keahlian, cinta kasih atau afeksi, keadilan, penghargaan atau penghormatan, keamanan, dan kebebasan. Oleh Gunna Adler Kaarlsson, dikatakan bahwa dimensi-dimensi kemiskinan tersebut memanifestasikan dirinya ke dalam bentuk: kurang gizi, air dan perumahan yang tidak sehat, penyakit kronis dan perawatan kesehatan yang tidak baik, serta pendidikan juga yang kurang baik.

Kedua, bahwa aspek-aspek kemiskinan itu saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran salah satu aspek kemiskinan dapat memengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek-aspek kemiskinan yang lainnya. Hubungan diantara aspek-aspek itu, biasanya disebut dengan istilah '*the poverty spiral*' atau spiral kemiskinan. Secara diagramatik, proses saling mempengaruhi antara aspek itu dapat digambarkan sebagai kekuatan pergerakan yang menjalar pada sebuah spiral. Pembangunan dapat dilihat sebagai pergerakan yang semakin meluas (*up ward movement*) dari semua unsur yang ada. Untuk mencapai hal ini, maka setiap unsur atau aspek harus bergerak dengan suatu kecepatan tertentu. Jika ada satu atau beberapa unsur atau aspek yang tidak dapat mengikuti pergerakan *upward* itu, maka akan berakibat berkurangnya seluruh pergerakan tersebut. Tanpa adanya kecepatan pergerakan yang memadai hanya akan menimbulkan suatu pergerakan sirkulasi pada suatu aspek tertentu saja. Berkurangnya pergerakan yang lebih lanjut akan menyebabkan pergerakan sirkulasi tersebut berhenti sepenuhnya, sehingga terjadilah pergerakan spiral yang semakin menyempit (*downward movement*).

Untuk itu maka berbagai wujud atau aspek kemiskinan harus ditangani secara serentak, untuk menggerakkan spiral yang semakin meluas melalui suatu mekanisme synergistic. Sebaliknya melalui suatu proses *synergistic negatif*. Dimana

semakin berkurangnya pergerakan pada satu atau beberapa aspek dapat menyebabkan pergerakan spiral yang semakin menyempit dan mempengaruhi pergerakan aspek lainnya. Implikasinya pada suatu program pembangunan adalah bahwa kita tidak dapat memperoleh suatu perbaikan yang berarti dan abadi tanpa adanya suatu perbaikan yang dilakukan secara serentak pada sektor-sektor atau aspek-aspek kemiskinan lainnya.

Ketiga, mengenai sektor kemiskinan. Yang dimaksud dengan aktor kemiskinan adalah orang-orang yang hanya sedikit atau yang tidak mampu mengakumulasi nilai-nilai- sesuatu yang dihargai oleh individu atau masyarakat – utama, sehingga kebutuhannya akan nilai tersebut tidak terpenuhi secara layak. Jadi disini jelas bahwa miskin itu hanyalah manusia, orang atau individu baik secara kolektif maupun individual. Kita sering mendengar istilah kemiskinan perkotaan, kemiskinan pedesaan, atau negara miskin, itu bukanlah berarti bahwa kota, desa, atau negara *ansich* yang mengalami kemiskinan, melainkan orang-orang atau penduduk kota, desa atau negara tersebut sebagian besar menderita kemiskinan.

2. Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Masa Lalu: Refleksi Sosiologis

Sejak periode paradigma pembangunan terdahulu dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pijakan pokok penterjemahan pembangunan di tanah air, dan pada paradigma baru pembangunan dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagai acuan dasar pelaksanaan pembangunan, persoalan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui berbagai upaya penanggulangan kemiskinan tetap diposisikan sebagai isu pokok dan strategis. Dengan dasar itu pula, maka disusun berbagai program pemberdayaan dengan tujuan untuk mengurangi populasi penduduk miskin secara berkesinambungan dan konsisten.

Berbagai penyelenggaraan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan seringkali tidak menuai hasil yang optimal dan bahkan seringkali gagal oleh karena berbagai sebab. Berdasarkan hasil diskusi dengan dinas terkait dengan wawancara dengan sejumlah informan di lapangan, beberapa faktor penyebab di balik ketidak efektifan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan adalah: diantaranya: *Pertama*, intervensi program dan kegiatan selain kurang menyentuh akar masalah, juga tidak didasarkan pada azas kebutuhan masyarakat miskin itu sendiri, *Kedua*, karena kemiskinan acapkali hanya dipahami sebagai faktor budaya: sekedar karena kelemahan mental, tidak dimilikinya etos wirausaha atau

bersumber dari faktor-faktor internal orang miskin itu sendiri. Padahal, banyak bukti memperlihatkan bahwa kemiskinan sesungguhnya adalah faktor structural, *Ketiga*, karena terjadinya bias dalam proses pemilihan kelompok sasaran program penanggulangan kemiskinan, dan ditambah lagi karena kurangnya kontrol yang berasal dari masyarakat miskin itu sendiri sebagai subyek program pembangunan, *Keempat*, karena belum adanya pembagian kerja yang lebih rinci dan belum dilakukannya koordinasi atau manajemen pengelolaan program kemiskinan yang berpola “ Satu Pintu “.

Upaya penanggulangan kemiskinan pada dasarnya merupakan langkah untuk membebaskan dan memproteksi masyarakat dari kemiskinan secara multidimensi. Dengan demikian, tidak hanya mencakup upaya mengatasi ketidakmampuan keluarga miskin untuk memenuhi konsumsi dasar (*basic need*), tapi juga sejauhmana kelompok masyarakat miskin memiliki akses yang tidak terbatas terhadap berbagai aspek kebutuhan dasar manusia, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya secara penuh (Dasar Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Bappenas, 2003).

3. Efektivitas Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan

Analisis sosial kritis dibutuhkan untuk mendekonstruksi suprastruktur yang dan perangkat-perangkat sosial lainnya yang secara bersama-sama mengkondisikan makin abadinya persoalan kemiskinan. Tak pelak, analisis sosial menyiapkan dan menawarkan konsepsi dan instrumentasi pragmatis dalam menemukan sumbatan-sumbatan yang menghambat akselerasi keberdayaan warga miskin. Analisis sosial dapat saja memiliki signifikansi daya ungkap jika persoalan kemiskinan diteropong secara obyektif melalui teorema dan konsepsi yang ril dan terukur. Dalam hal ini, kita lebih banyak mengenalnya dengan metode SWOT Analysis.

4. Kekuatan dan Kelemahan

Hasil akhir dari rangkaian proses penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat adalah sangat ditentukan dari sejauhmana keunggulan potensi yang ada di daerah dan begitu pula sisi kelemahan yang ada. Kedua aspek ini memiliki pengaruh nyata secara sendiri-sendiri sekaligus menentukan tingkat keberhasilan dari rangkaian proses tersebut. Kekuatan sebagai anasir terpenting dalam menunjang keberhasilan suatu penyelenggaraan program dan kegiatan

penanggulangan kemiskinan adalah mencakup potensi-potensi positif serta prospektif yang dapat dikontribusikan dalam menunjang secara langsung maupun tidak langsung pada tataran pelaksanaan dan pada tingkat garis kebijakan yang ada. Demikian pula dengan kelemahan yang lebih diposisikan sebagai elemen negative yang memiliki pengaruh kurang baik terhadap target pencapaian tujuan yang lebih baik dari tiap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan.

Sejumlah kekuatan dan kelemahan yang dapat diidentifikasi terkait dengan upaya serius menanggulangi kemiskinan di Indonesia secara umum disajikan pada matriks berikut:

Tabel 1: Kekuatan dan Kelemahan Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Kekuatan	Kelemahan
Sistem desentralisasi dan <i>political will</i> dari pemerintah daerah mulai menguat;	Pola pikir, sikap dan perilaku sebagian masyarakat yang masih sempit. Keberdayaannya masih disandarkan kepada tanggung jawab pemerintah;
Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang relative banyak, khususnya yang bergerak di sector pertanian;	Rendahnya kemampuan keuangan daerah untuk membiayai program atau kegiatan pemberdayaan secara memadai
Terdapatnya potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam bidang pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal;	Kualitas, kememadain, dan jangkauan prasarana public yang belum memadai;
Kegiatan agribisnis sudah berkembang selama dua decade yang dapat meningkatkan kuantitas dana cadangan untuk penanggulangan kemiskinan;	Ketidakmerataan penyediaan dan penempatan prasarana publik yang terkait dengan perbaikan pendidikan dan kesehatan warga;
Masyarakat yang religius dan nilai-nilai agama serta budaya menajadi landasan pada seluruh aspek kehidupan;	Penataan organisasi yang belum sesuai dengan dengan PP No.8 tahun 2003.;
Masyarakat melalui proses belajarnya telah	Rendahnya semangat

responsive terhadap setiap program pembangunan yang dilakukan, baik pusat maupun daerah;	keaktivitas dan inovasi masyarakat sebagai siasat penting menuju keberdayaan & kemandirian.
Terjalinnnya hubungan yang sinergis antara ulama dan umara dalam menyikapi persoalan kemiskinan sebagai penyakit social yang harus diberantas;	Lemahnya kualitas SDM pemerintah yang mampu menerjemahkan dan mengimplementasikan setiap dokumen perencanaan pembangunan;
Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam peningkatan prasarana, jangkauan dan mutu pendidikan dan kesehatan;	Penyelesaian persoalan kemiskinan masih dipandang oleh banyak pihak sebagai tanggung jawab pemerintah saja, bukan tanggung jawab bersama secara multipihak;
Adanya peluang pengembangan wilayah yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi dan bidang potensil lainnya;	Masih rendahnya semangat masyarakat untuk berswadaya dalam mengelola dan mengatasi persoalannya sendiri.

5. Peluang dan Ancaman

Untuk mencegah agar imbas krisis tidak makin melebar dan sekaligus membangun kembali keberdayaan penduduk miskin, sebetulnya sudah banyak dana digulirkan dan upaya telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk menanggulangi kemiskinan. Selain mencoba menyusun peta fokus sasaran program penanggulangan kemiskinan yang lebih *up to date* dan rinci, membentuk dan memberdayakan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), juga yang tak kalah penting adalah bagaimana agar program yang disusun benar-benar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat miskin itu sendiri.

Saat ini, dua strategi utama yang dikembangkan pemerintah untuk mempercepat upaya penanggulangan masyarakat miskin adalah: Pertama, meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas, di mana masyarakat

miskin yang memiliki kemampuan dalam hal pengelolaan memperoleh peluang dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Kedua, mengurangi pengeluaran melalui pengurangan beban kebutuhan dasar yang ditanggung masyarakat miskin, seperti akses ke pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat miskin. Terlepas dari sejumlah kendala dan bagaimana implementasi dari dua strategi di atas, yang jelas adanya komitmen pemerintah pusat yang kuat untuk menanggulangi persoalan kemiskinan merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan dan direspon dengan penuh kesungguhan.

Pengalaman di masa lalu telah mengajarkan pada kita, bahwa kelemahan dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan adalah bermula dari kebijakan pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro, dan sifatnya cenderung sentralistik sehingga tidak peka pada kebutuhan lokal. Di sisi lain, seringkali program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan seringkali memposisikan masyarakat sebagai obyek dan bukan subyek yang memiliki spasi keterlibatan secara signifikan. Dengan memandang kemiskinan hanya dari aspek ekonomi saja, maka yang terjadi kemudian permasalahan kemiskinan di berbagai daerah dan komunitas seringkali dianggap serba sama (*uniform*) dan diyakini akan dapat dipecahkan semata-mata hanya dengan mengandalkan pemberian bantuan modal usaha.

Tabel 2: Peluang dan Ancaman di Balik Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Peluang	Ancaman
Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah mulai membaik	Belum pulihnya nilai-nilai universal dalam kehidupan masyarakat
Koordinasi yang makin solid secara multi pihak, antardinas dan antarstakeholder lainnya.	Potensi korupsi masih ada
Tumbuhnya kelompok-kelompok peduli (komunitas <i>volunteer</i>)	Mentalitas aparatur yang sebagian besar masih orientasi proyek
Cara pandang masyarakat terhadap bantuan sudah terkoreksi dan	Kondisi mentalitas masyarakat yang dependent dan apatis

cenderung kooperatif	terhadap perubahan
Dukungan politik dari jajaran dewan mulai menguat	Masih tingginya ego sektoral
Adanya arah kebijakan dan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang makin jelas	Rendahnya tingkat pengetahuan dan kepedulian aparat pemerintah tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
Ketersediaan <i>budget/financial</i> yang <i>pro poor</i>	Berkembangnya lingkungan global yang cukup pesat yang mempengaruhi system social dan system ekonomi
Desentralisasi dan otonomi daerah	Belum stabilnya system penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah
Pengenalan gerakan dan budaya <i>good governance</i> di tingkat aparaturnya dan masyarakat	Meluasnya areal perkembangan komoditas andalan di kabupaten lain
Transparansi dan akuntabilitas sebagai isu strategis cenderung menguat	Perubahan tatanan sosial, politik, dan ekonomi yang berlangsung secara tiba-tiba.

Menurut Bert Hofman (*ex* direktur world bank), secara teoritis empat pilar yang dapat mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan adalah : (1) pemberdayaan masyarakat miskin dan pengalokasian untuk masyarakat miskin, (2) penyediaan dana dan program jaringan pengamanan sosial (*social safety nets*) yang tepat, (3) membenahi daya saing indonesia, dan (4) transparansi untuk mengurangi kecenderungan terjadinya korupsi dan lemahnya penegakan hukum (Kompas, 21 Juni 2003).

6. Teori Strukturalis dan Sumbangannya dalam Menganalisis Persoalan Kemiskinan

Sebagai salah satu teori sosial dengan kualifikasi ruwet dan melelahkan logika dalam upaya untuk memahaminya, teori ini dengan sendirinya mereproduksi dualitas tendensi bagi pembacanya; abai sekaligus penasaran. Intelektualitas Giddens diuji melalui teori yang digagasnya ini sebagai sebuah jembatan yang mendamaikan kutub fungsionalis Parsonian dan kutub Strukturalis Levi Strauss. Moderasinya teridentifikasi dari tawaran konsepsi yang sedikit mudah dipahami ketimbang teori system, yakni seputar aktor dalam perspektif teori Dramaturgi Erving Goffman, atau entitas berkesadaran dalam perspektif teori

interaksionisme simbolik Mead. Oleh Giddens, konsepsi itu dipredikati dengan terminology Struktur dan Agen.

Struktur versi Giddens menunjukkan hamparan konsepsi yang mengkonstruksi sebuah paradigma logis yang menjelaskan struktur secara lebih lengkap dan detail. Kendati demikian, konsepsi Giddens tentang struktur dapat disimplikasi untuk keperluan diskusi tentang persoalan kemiskinan. Struktur berarti seperangkat aturan yang didalamnya *inherent* kekuasaan pada satu institusi. Organisasi dan penjabarannya secara rigid hingga ke tingkat paling dasar merupakan tembok kokoh bagi individu yang posisinya berada di luar kekuasaan. Oleh Giddens, struktur menekan, mengendalikan dan memaksa komunitas untuk taat pada regulasi struktur.

Terma kedua dalam perangkat teori strukturasi Giddens adalah Agen atau agensi. Agen adalah actor atau entitas produktif yang memiliki kualifikasi untuk mengerem laju penindasan struktur terhadap komunitas. Agen dalam perspektif Giddens adalah orang yang memiliki kemampuan menggunakan (secara terus menerus di dalam kehidupan sehari-hari) sederet kekuasaan kausal, termasuk memengaruhi kekuasaan yang dijalankan orang lain. Tindakan agen harus mencerminkan visi perubahan yang terkonsultasikan dengan kecenderungan komunitas yang dibelanya.

Kemiskinan yang sistemik merupakan produksi struktur karena terdapat campur tangan struktur, dalam hal ini pemerintah. Kebijakan, program hingga kegiatan yang diimplementasikan ke komunitas miskin seringkali memarahkan ketergantungan, bukan memandirikan komunitas itu sendiri. Dalam tingkatan yang paling mengerikan, struktur seringkali merepresentasikan dirinya sebagai monster yang haus darah melalui praktik perampasan, penyerobotan, penggusuran, pengambilan hak dan segala tindakan tidak terpuji lainnya. Analisis sosial harus memiliki sensitivitas yang baik dan keberpihakan yang konsisten terhadap komunitas yang dimarginalkan. Analisis sosial adalah actor, agen, atau fasilitator yang mampu menyulut tumbuhnya kesadaran kritis masyarakat rentan untuk melawan struktur yang otoritarian dan tiranik. Stratifikasi strukturasi Giddens menyiapkan perangkat analisis yang lain, yakni rasionalitas tindakan, mirip dengan konsepsi Max Weber kendati memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Rasionalitas tindakan agen versi Giddens mendisposisi dilakukannya seperangkat tindakan oleh agen atau aktor yang terencana, menerus, dan tindakan itu terejawantah secara radikal. Kemiskinan dan sejumlah gagasan untuk mengatasinya sudah barang tentu merekomendasikan hadirnya agen-agen yang memiliki keberpihakan

yang sengit untuk mengentikan tindakan patologik struktur. Untuk mendaratkan termonologi agen dalam tataran yang lebih pragmatis, khususnya dalam konteks penanggulangan kemiskinan maka terma agen sesungguhnya adalah apa yang disebut “fasilitator” dalam kancah pengembangan masyarakat.

Penulis memiliki paradigma spesifik dan bahkan terkesan liar terhadap siapa itu fasilitator? Dengan menjadikan esensi etimologisnya sebagai dasar pemaknaan dalam mendeskripsikan siapa itu fasilitator, maka tidak diragukan lagi bahwa fasilitator adalah orang atau aktor “khas”, jelas bukan orang kebanyakan. Atau kalau kita meminjam terminologi sosiolog Imam B. Prasodjo (dalam Bornstein, 2008), bahwa fasilitator itu adalah orang “abnormal”. Abnormal karena fasilitator yang tercerahkan sanggup melampaui batas kenormalannya. Atau dalam idiom postmodernisme disebut sebagai fenomena hyperrealitas, melampaui realitasnya sendiri. Kekhasan dan abnormalitas adalah dualitas *term* yang memiliki sistem-sistem operasi yang sebangun, keduanya memandang jauh ke depan ke titik lompatan kuantum terjauh. Betapa tidak, kekhasan dan abnormalitas sesungguhnya telah menjadi piranti dasar bagi tumbuhnya aktor-aktor yang mengkreasi dan membangkitkan sebuah perubahan sosial, yang tidak saja keberlangsungannya bersifat evolusioner tetapi sekaligus pula revolusioner.

Barisan tokoh kaliber global, secara terbatas disebutkan di sini; Ibnu Sina, Einstein, Wilbur dan Oliver bersaudara, Henry Ford, Steve Jobs, dan Soekarno adalah fasilitator yang dedikatif pada bidangnya masing-masing. Ia fasilitator karena membuat sesuatu menjadi mudah dengan telah berhasil memecahkan banyak persoalan di bumi ini sehingga panggung kehidupan itu lebih menarik, serba mudah, dan yang terpenting dari itu adalah menjadikannya lebih manusiawi. Kelompok tokoh-tokoh ini telah meninggalkan guratan pada sejarah. Prasastinya abadi dan menjadi mata air inspirasi yang tidak pernah kering.

Fasilitator pemberdayaan masyarakat, sebagaimana gagasan di di atas, mestinya terpersonifikasi sebagai individu yang langka, khas, dan abnormal. Tidak saja cukup ilmu namun keteguhannya harus kuat dalam melaksanakan gagasan-gagasannya untuk sebuah perubahan pada skala yang lebih luas. Masyarakat terilustrasikan sebagai kompleksitas permasalahan, dari yang sangat ringan hingga ke super berat. Dari yang dapat diselesaikannya sendiri hingga yang penyelesaiannya membutuhkan jasa pihak luar. Pertanyaannya adalah apakah jika seseorang ingin menjadi fasilitator secara otomatis telah memiliki cukup kemampuan untuk memecahkan satu atau bahkan banyak persoalan masyarakat tersebut? Di sinilah relevansinya bahwa fasilitator itu adalah orang khas dan

abnormal. Bukan individu biasa karena idealnya ia harus menjadi ikon peubah. Kekuatan untuk mengubah tatanan inilah yang kemudian disebut Gidens sebagai agen dengan rasionalitas tindakan yang mengubah dunia sosial.

C. Kesimpulan

Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, telah disepakati bahwa upaya penanggulangan kemiskinan bukanlah tanggung jawab dan semata-mata merupakan program nasional yang sifatnya sentralistik, tetapi penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Sesuai dengan *motto* penanggulangan kemiskinan, yaitu bekerja bersama-sama untuk menanggulangi kemiskinan (*working together to reduce poverty*), maka disadari bahwa masalah kemiskinan hanya bisa ditanggulangi melalui kerja sama dari semua unsur masyarakat, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan unsur di luar pemerintah. Namun demikian harus pula dipahami bahwa yang bisa menanggulangi kemiskinan tentunya adalah orang miskin itu sendiri. Unsur masyarakat yang lain hanyalah sebagai fasilitator dan motivator, sehingga upaya yang paling pokok dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan adalah bagaimana memberdayakan dan memampukan masyarakat miskin (Pedoman Umum KPK Daerah, 2003).

Di Indonesia meski secara makro perkembangan ekonomi nasional menunjukkan tanda-tanda membaik. Akan tetapi, persoalannya adalah mengapa hal itu tidak mampu menggerakkan sektor riil yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat miskin? Sebagai Kota terbesar nomor dua di Indonesia, jelas apa yang terjadi ditingkat nasional secara langsung maupun tidak akan berimbas pada masyarakat kota ini.

Berdasarkan hasil kajian Bappenas (2003), beberapa kelemahan dari pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia adalah:

- a) Pertama, program penanggulangan kemiskinan masih bersifat parsial, belum terpadu dan komprehensif.
- b) Kedua, belum tersedianya instrumen upaya penanggulangan kemiskinan yang spesifik sesuai dengan keragaman dimensi permasalahan kemiskinan di setiap daerah.
- c) Ketiga, berbagai kebijakan yang semula di proyeksikan untuk mengatasi masalah kemiskinan pada kenyataannya justru melahirkan masalah baru, yang menyebabkan berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan.

- d) Keempat, lemahnya birokrasi pemerintah, kecilnya peran masyarakat dan LSM, tidak sinkronnya kebijakan pusat dan daerah, terhambatnya komunikasi pembuat program dengan stakeholders. Sumber: Informasi Dasar Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan daerah, Bappenas 2003.

Daftar Pustaka

- Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 2000. Indonesia: *Strategi Baru Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta : BKPK
- Bappenas. 2004. Indonesia: *Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals)*. Jakarta: Bappenas-UNDP
- Bappenas. 2004. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional*. Jakarta : Bappenas
- Bappenas-PSDA. 2002. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dengan Strategi Kemitraan: Naskah Kebijakan*. Jakarta : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Tim Inti Applied Policy Development Training (DPAII-SP85) BAPPENAS-CIDA
- Bappenas. 2004. *PPA Participatory Poverty Assesment*. Jakarta : Bappenas –KIKIS
- 2002. *Naskah Kebijakan Pengelolaan SDA dengan Strategi Kemitraan*. Jakarta : Bappenas
- 2004. Jakarta : Yayasan Kehati – Kemitraan Multistakeholders Forrest Programm - Kantor Meneg Lingkungan Hidup TKP3KPK. *Draft Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional*. Jakarta : TKP3KP
- Bornstein, David. 2008. *Mengubah Dunia*. Insist Press; Yogyakarta.
- BPS, Bappenas dan UNDP. 2004. *Laporan Pembangunan 2004: Ekonomi Dari Demokrasi. Membiayai Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta : BPS – Bappenas - UNDP Indonesia
- BPS dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan. 2002. *Pembangunan Manusia dan Kesetaraan Gender: Peta dan Disparitas Pencapaian Antar Wilayah Tahun 2002*. Jakarta : BPS
- BPS. 2003. *Data dan Informasi Kemiskinan: Buku 2 Kabupaten*. Jakarta : BPS
- BPS, Departemen Sosial. 2004. *Analisa Deskriptif Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2003*. Jakarta : BPS – Departemen Sosial
- BPS, Departemen Sosial. 2004. *Profil Penduduk Fakir Miskin 2003*. Jakarta : BPS – Departemen Sosial
- Dwiyanto, Agus dkk. 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Departemen Kesehatan. 2003. *Profil Kesehatan Indonesia 2002*. Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia
- GAPRI. 2003. *Strategi Bersama Masyarakat Sipil Indonesia: Empat Pilar Demokratisasi untuk Melawan Kemiskinan dan Pemiskinan*. Jakarta : GAPRI

- Giddens, Anthony. 2010. *Teori Strukturasi (Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat)*, Pustaka Pelajar; Yogyakarta.
- Gugus Tugas I. 2004. *Masalah Kemiskinan dan Kompleksitas Penanggulangannya*. Jakarta : TKP3KPK Kementerian Koordinator Bidang Kesra.
- Gugus Tugas I. 2004. *Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Penciptaan Kesempatan*. Jakarta : TKP3KPK Kementerian Koordinator Bidang Kesra
- Gugus Tugas II. 2004. *Akar Kemiskinan dan Ketidakeberdayaan Masyarakat*. Jakarta : TKP3KPK Kementerian Koordinator Bidang Kesra
- Gugus Tugas II. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta : TKP3KPK Kementerian Koordinator Bidang Kesra
- Gugus Tugas II. 2004. *Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: TKP3KPK Kementerian Koordinator Bidang Kesra
- Gugus Tugas III. 2004. *Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Keluarga Miskin*. Jakarta : TKP3KPK Kementerian Koordinator Bidang Kesra.
- Gugus Tugas IV. 2004. *Pemetaan Permasalahan Kemiskinan tentang Kerentanan dan Resiko Sosial Yang Terkait Dengan Perlindungan Sosial*. Jakarta : TKP3KPK Kementerian Koordinator Bidang Kesra
- Gugus Tugas IV. 2004. *Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Perlindungan Sosial Bagi Keluarga Rentan dan Miskin*. Jakarta : TKP3KPK Kementerian Koordinator Bidang Kesra
- ILO. 2003. *Seri Rekomendasi Kebijakan: Kerja Layak dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta : ILO
- KIKIS. 2004. *Hasil Kajian Kemiskinan Bersama Komunitas*. Jakarta : KIKIS
- LPEM UI, PSE-KP UGM, PSP-IPB. 2004. *Laporan Studi Dampak Kebijakan Ekonomi Makro terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta. Jakarta : LPEM UI - PSE KP UGM – PSP IPB
- LP3ES (Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial). 2003. *Laporan Akhir Proyek pelibatan Media Massa dalam Pemantauan PPK Fase II Tahap 1 Periode Oktober 2002-September 2003*. Jakarta : LP3ES
- Office of The High Commissioner for Human Rights. 2002. *Draft Guidelines: A Human Right Approach to Poverty Reduction Strategies*. United Nations
- Oktafiani, Rina. 2002. *Food Security And Rice Import Tariffs: A Backroud Paper for The Indonesian Case Study On The Macroeconomics of The Poverty Reductions*. UNDP. Jakarta
- PKPEK (Perkumpulan untuk Kajian dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan). 2003. *Hasil Monitoring Pelaksanaan PPK tahap II Di daerah Istimewa Yogyakarta. Periode Juni-Desember 2003*. Dipresentasikan di Setda DIY 1 Desember 2003

- Ritzer, George dan Goodman J. Douglas. 2010. *Teori Sosiologi*. Kreasi Wacana. Jakarta.
- Sjaifudian, Hetifah. 2002. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Bandung : The Ford Foundation dan Bandung Trust Advisory Group
- SMERU. 2004. *Laporan Hasil Konsolidasi Kajian Kemiskinan Partisipatif*. Jakarta : SMERU
- Stalker, Peter and Satish Mishra. 2003. *The Right To Development In Indonesia*. Jakarta : UNSFIR
- Tim Konsultasi Publik RUU Pengelolaan Sumberdaya Alam. 2004. *Di Bawah Satu Payung: Hasil Konsultasi Publik RUU Pengelolaan Sumberdaya Alam*.
- UNDP. 2003. *Poverty Reduction and Human Rights: A Practice Note*. UNDP
- WWF. 2004. *Perubahan Ekonomi, Kemiskinan dan Lingkungan: Laporan Tahap II*. Jakarta : WWF
- WWF. 2003. *Laporan Kegiatan Pengumpulan Informasi Konservasi dan Kemiskinan untuk Pengembangan Sistem Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Pulau Lombok*. Jakarta : WWF